Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

RANCANGAN AKHIR

RENSTRA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tahun 2025 - 2029

Jl. Agathis, Gedung PUPR-PERKIM Lt.4 Tanjung Selor,
Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, hikmat, rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen ini merupakan hasil identifikasi, analisis kondisi, pengendalian, evaluasi, saran dan masukan serta rumusan dan kesepakatan bersama untuk memastikan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian pengembangan (riset dan inovasi) serta kontribusi terhadap tujuan dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel. Renstra tahun 2025-2029 akan menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan tahunan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa dokumen perencanaan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, atas dukungannya melalui saran, masukan dan partisipasinya dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif, inovatif, akuntabel dan berkelanjutan.

Tanjung Selor, September 2025
Kepala Badan,

Bertius, S.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19720206 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR..... IV

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 6
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1. Tugas, fungsi dan Struktur PD 8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.1.4. Kelompok sasaran layanan..... 35
2.1.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan..... 39
2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD 42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 43
2.2.1. Permasalahan 43
2.2.2. Isu Strategis 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 48
3.2 Strategi Perangkat Daerah 53
3.3 Arah Kebijakan Perangkah Daerah..... 54

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 57
4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan 57
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah..... 113
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD .....,..... 113
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD..... 113

BAB V PENUTUP..... 115
5.1. Kaidah Pelaksanaan 115
5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi..... 116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi ASN Bapperida.....	18
Tabel 2.2	Tabel Tingkat Pendidikan ASN Bapperida.....	19
Tabel 2.3	Rekapitulasi ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	21
Tabel 2.4	Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 2.7	Kelompok Sasaran Layanan.....	35
Tabel 2.8	Mitra Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
Tabel 2.9	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD....	43
Tabel 2.10	Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..	43
Tabel 2.11	Penentuan Isu Strategis Bapperida.....	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029.....	49
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.....	52
Tabel 3.3	Strategi RPJMD Prov Kaltara 2025-2029.....	54
Tabel 3.4	Penahapan Strategi PD Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Bapperida Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.....	58
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Prov Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.....	81
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas mendukung program pembangunan daerah.....	110
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD.....	113
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kinerja PD.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan 3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida..... 11
Gambar 2.2 Kondisi ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan jenis Kelamin 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik yang diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut maka diperlukan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan Perencanaan pembangunan Daerah menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Kemudian dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga Rencana pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. selain itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam usaha mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. melalui Undang- Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah. perangkat daerah tersebut memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi didaerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didaerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam level operasional kebijakan tersebut pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah di implementasikan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

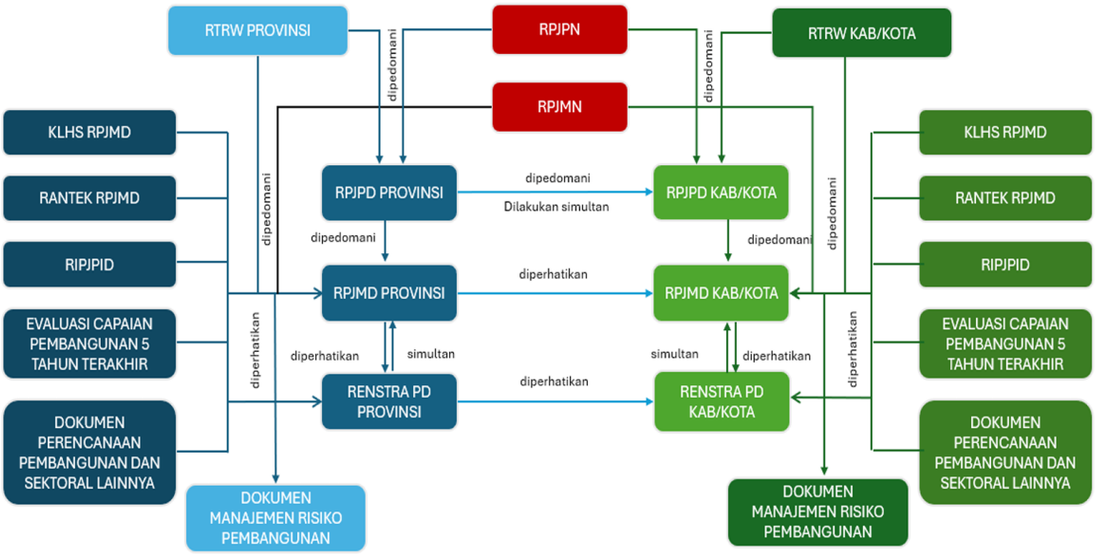
tata kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah (Bapperida) adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang perencanaan, pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Kalimantan Utara juga merupakan 1 (satu) dari 37 (tiga puluh tujuh) Provinsi yang melaksanakan agenda tersebut. Kemudian dalam melaksanakan amanat Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Selanjutnya sebagai Penjabaran operasional pada level Perangkat daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. selanjutnya Rencana strategis Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk menjadi rumusan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 dan memperhatikan Isu KLHS RPJMD, Rancangan teknokratik RPJMD, Laporan pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan periode sebelumnya Dokumen Perencanaan pembangunan Sektoral lainnya serta juga memperhatikan Dokumen Manajemen Resiko Pembangunan. Atas dasar tersebut maka Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan proses integrasi, sinkronisasi dan sinergitas semua potensi, sumber daya, peluang dan tantangan pada bidang urusan perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang tepat sasaran, berkualitas dan akuntabel. Adapun keterkaitan renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar 1.1
Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 30).

35. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dokumen Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah (lima tahunan) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja selama periode tertentu. Selain itu Renstra Bapperida merupakan wujud implementasi operasional visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD tahun 2025-2029, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah beserta kerangka pendanaan untuk periode lima tahun dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, sesuai dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan Program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029;
2) Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja dan Rencana Kerja tahunan perangkat daerah (Renja);
3) menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja perangkat daerah melalui indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci yang terukur, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dievaluasi secara objektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai Gambaran Pelayanan Renstra Perangkat Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
   a. Tugas, fungsi dan struktur PD
   b. Sumber daya Perangkat Daerah
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   d. Kelompok sasaran layanan
   e. Mitra Layanan
   f. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   a. Permasalahan
   b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.2. Strategi Perangkat Daerah
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Program, Kegiatan Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

4.1. Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
   a. Uraian Program;
   b. Uraian Kegiatan
   c. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
   d. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah;

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
   a. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
   b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
4. Perumusan, perencanaan,pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
5. Perumusan, perencanaan,pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
6. Perumusan, perencanaan,pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
7. Perumusan, perencanaan,pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pengembangan;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

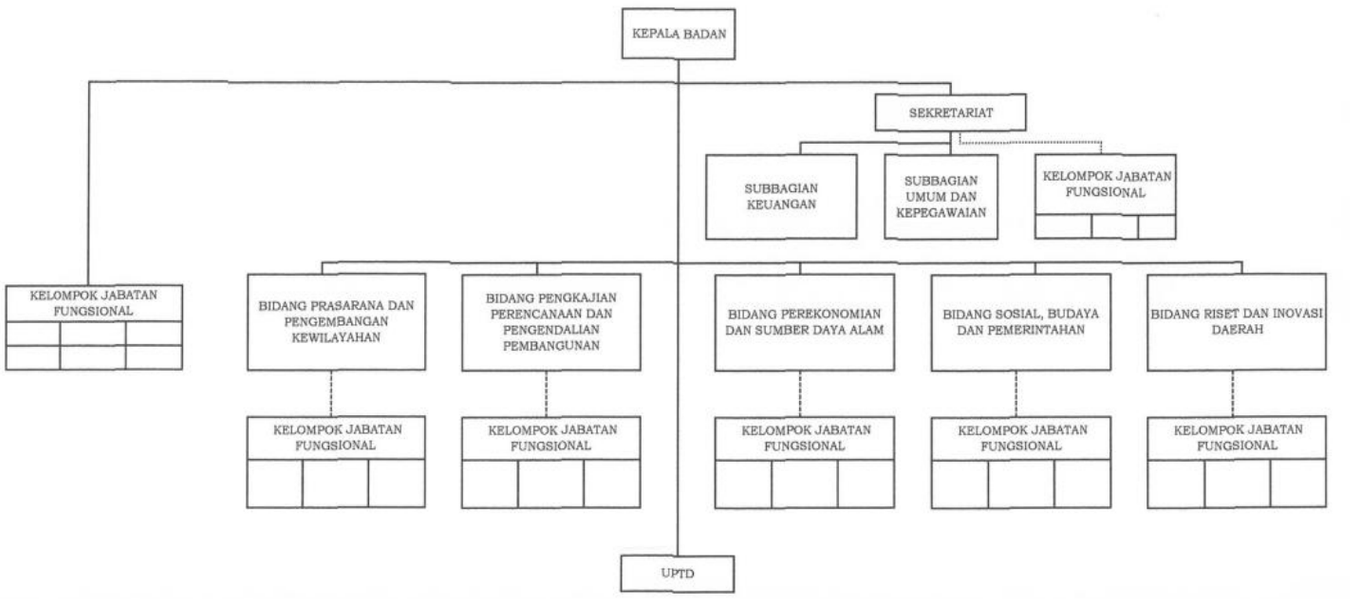
Dalam rangka memastikan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara berfungsi dengan teratur dan terarah, sehingga dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan optimal sehingga dibutuhkanya manajemen organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Melalui struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien berfungsi untuk ;

a) memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar unit kerja atau bidang;

b) mendefinisikan hubungan hierarkis dan alur pelaporan, dari pimpinan tertinggi hingga staf terendah;
c) menjadi acuan utama untuk berbagai kebijakan kepegawaian. Perangkat daerah membutuhkannya untuk merencanakan kebutuhan pegawai, menetapkan formasi jabatan, serta mengatur rotasi dan promosi berdasarkan struktur yang ada;
d) meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara memiliki susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan kepegawaian: dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan;
4. Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
7. Bidang Riset dan Inovasi daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk memastikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap level organisasi berjalan dengan teratur, dari mandat strategis hingga operasional, sehingga perlu dijabarkan peran spesifik, tanggung jawab dan kewenangan setiap pejabat yang menduduki jabatan struktur organisasi dalam uraian tugas jabatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, menjadi landasan Bapperida Kalimantan Utara dalam menjabarkan peran, tanggung jawab dan kewenangan setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural organisasi di Lingkup Bapperida Provinsi Kalimantan Utara. Adapun uraian tugas dan jabatan struktural pada Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan Penyusunan Rencana Program Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. mengarahkan penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
c. mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
e. mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
f. menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
g. menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan sesuai peraturan yang berlaku untuk menjamin tercapainya koordinasi dan kesepakatan perencanaan pembangunan daerah;
h. mengarahkan penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir rencana pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah;
i. melakukan Koordinasi dan Penyelarasan melalui Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
j. mengarahkan untuk menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
k. mengarahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;

l. Mengevaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
m. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
o. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
g. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
e. meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
f. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
g. melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebelum diterbitkan SPM;
h. melakukan pembinaan dan penilaian dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c. menyusun perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
d. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
e. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
g. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
h. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;

i. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
j. melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
k. menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

5. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan alokasi pembiayaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang meliputi pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas (Bina Marga dan Perhubungan), Pembangunan Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah (Aspek Tata Ruang dan Pemetaan) untuk penajaman program/kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan Bidang berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan;
c. merumuskan rencana program/kegiatan berdasarkan usulan Subbidang dan skala prioritas;
d. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbidang sesuai tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
e. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama agar tercapainya hasil dan manfaat program/kegiatan secara optimal;
g. mengoordinasikan Program dan kegiatan pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
h. mengarahkan rencana kerja program Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Sinkronisasi program/kegiatan lingkup koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan instansi terkait;
k. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan

6. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan alokasi pembiayaan Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan yang meliputi pembiayaan dan pengendalian terhadap Pembangunan;
b. mengoordinasikan program kegiatan pembangunan Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan diarahkan kepada Peningkatan Pembangunan Daerah dan upaya Pengendalian terhadap Pengendalian tersebut;
c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai peraturan yang berlaku;
d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
e. mengoordinasikan asistensi dan verifikasi RENSTRA SKPD;
f. memfasilitasi penyusunan perencanaan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pemerintah daerah;
g. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD/Pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menjamin sinkronisasi perencanaan;
h. memfasilitasi kerjasama Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
i. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbidang dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja;

7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan Operasional program kegiatan dan alokasi pembiayaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi Dunia Usaha, Industri dan Perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kemaritiman sesuai dengan peraturan agar terlaksana;

b. mendistribusikan tugas kepada Subbidang Pengembangan SDA, Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup dan Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman, berdasarkan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
c. memberi petunjuk Subbidang Pengembangan SDA, Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup dan Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perekenomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. memfasilitasi kerjasama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Dunia Usaha, Industri dan Perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumberdaya alam, lingkungan hidup, serta kemaritiman sesuai dengan kebijakan pimpinan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan, baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
h. menyelia pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Dunia Usaha, Industri dan Perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumberdaya alam,lingkungan hidup , serta kemaritiman sesuai dengan kebijakan pimpinan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
i. mengevaluasi kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan kebijakan dari pimpinan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
j. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

8. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan alokasi pembiayaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang meliputi pembiayaan Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pemerintahan serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
c. mengarahkan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif;

d. mendistribusikan tugas kepada Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
f. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
g. mengoordinasikan Program dan kegiatan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
h. mengarahkan rencana kerja program Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan sinkronisasi program/kegiatan lingkup koordinasi Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal;
j. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

9. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja;
b. mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. mengoordinir penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi dan data yang berkaitan dengan program Kelitbangan;
g. Merekomendasikan hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan
h. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

i. mengoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan kepada SKPD dan lembaga terkait di Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Evaluasi Pembangunan Kalimantan Utara;
j. melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kelitbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
k. merumuskan dan menyajikan hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kelitbangan sebagai bahan informasi kepada Pimpinan dan Masyarakat;
l. memfasilitasi kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
m. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan penelitian pengembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara;
n. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah adalah modal utama yang dibutuhkan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tanpa sumber daya yang memadai, pelayanan publik, pembangunan akan terhambat, bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. sumber daya perangkat daerah meliputi, sumber daya manusia, aset/ sarana dan prasarana serta anggaran.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah semua individu yang bekerja di dalam suatu organisasi, dan merupakan aset terpenting dan vital bagi sebuah organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran dan fungsi krusial bagi organisasi melalui kompetensi, keterampilan, pengalaman, nilai-nilai, etos kerja dan potensi untuk membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pelayanan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara Bapperida Provinsi Kalimantan Utara mencakup 2 (dua) kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data bezetting ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara per Agustus 2025 berjumlah 68 Orang, dengan uraian data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Rekapitulasi ASN Bapperida

No	Jabatan	Bezetting	Kebutuhan	-/+
1	Kepala Badan	1 Orang	1 Orang	-
2	Kepala Bidang	3 Orang	6 Orang	-3 Orang
3	Kepala Subbagian	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
4	Perencana Ahli Pertama	0	28 Orang	-28 orang
5	Perencana Ahli Muda	9 Orang	17 Orang	-8 orang
6	Perencana Ahli Madya	0	10 Orang	-10 orang
7	Perencana Ahli Utama	0	1 orang	-1 Orang
8	Peneliti Ahli Pertama	2 Orang	2 orang	-
9	Peneliti Ahli Muda	0	2 Orang	- 2 Orang
10	Suveyor Pemetaan Pertama	0	1 Orang	-1 Orang
11	Suveyor Pemetaan Muda	0	1 Orang	-1 Orang
12	Pranata Komputer Pertama	1 Orang	1 Orang	-
13	Pranata Komputer Muda	0	1 Orang	-1 Orang
14	Pelaksana	33 Orang	97 Orang	-64 Orang
15	PPPK	18 orang	36 Orang	-18 Orang
Total		**68 Orang**	**206 Orang**	**138 Orang**

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaiaan Bapperida, 2025

Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan sebanyak 206 ASN untuk dapat optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi saat ini jumlah ASN yang tersedia hanya 68 orang (33%) dari total kebutuhan sebanyak 206 orang. Kemudian dari tabel diatas menunjukan data mayoritas ASN berada di dua kategori utama yaitu ASN Pelaksana sebanyak 33 orang (48,5%) dan Fungsional, baik itu pada jenjang jabatan Perencana Ahli Muda (9 orang), Peneliti Ahli Pertama (2 orang), dan Pranata Komputer Pertama (1 Orang) yang berjumlah 12 orang (17,6%), hal tersebut menunjukan inti dari operasional organisasi bergantung pada peran pelaksana, dan organisasi memiliki fokus yang kuat pada level teknis operasional dan fungsional. Keberadaan PPPK sebanyak 18 orang (26,5%) menunjukkan bahwa PPPK berperan penting dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu terdapat kesenjangan dalam jenjang jabatan, terutama di kategori fungsional dan struktural. Pada kategori jabatan fungsional, Perencana Ahli Muda sangat dominan (9 orang), sementara belum ada Perencana Ahli Pertama, Ahli Madya, maupun Ahli Utama. Hal tersebut disebabkan oleh Kebijakan Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan organisasi memiliki banyak pegawai

fungsional yang berada di level tengah (ahli muda), sehingga dibutuhkan arah kebijakan yang jelas untuk pengembangan karier ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, terutama dari jenjang fungsional muda ke madya atau utama, serta dari jabatan pelaksana ke fungsional ahli pertama. Implikasi dari kondisi tersebut yaitu kurangnya pejabat struktural dan kesenjangan di jenjang fungsional dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pembagian tugas.

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ASN dalam suatu organisasi menentukan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan data tingkat pendidikan ASN Bapperida terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, adapun data tersaji sebagai sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Tingkat Pendidikan ASN Bapperida

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S-2	11 Orang
2	Sarjana S-1 / Diploma-4	44 Orang
3	Diploma-3	6 Orang
4	SLTA/sedarajat	7 Orang
Jumlah		**68 Orang**

Sumber: data diolah

Berdasarkan data diatas dapat diinformasikan bahwa mayoritas tingkat Pendidikan ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara didominasi tingkat pendidikan Sarjana, baik itu Sarjana S-1 dan/atau Diploma-4 dengan jumlah 44 Orang (64,7%) dan Sarjana S-2 dengan jumlah 11 Orang (16,2%). Hal tersebut menunjukan kualifikasi dan kompetensi intelektual ASN di Bapperida, yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi Bapperida yang menuntut analisis, riset, dan perumusan kebijakan. Selain itu juga di dukung dengan kontribusi dari tingkat pendidikan Diploma dan SLTA yang berperan untuk mendukung operasional seperti staf administrasi, teknisi, atau pelaksana.

Kemudian untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kompetensi dan kualitas ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pelayanan dalam menyikapi dinamika perubahan yang terjadi, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong dan memberi ruang kepada ASN untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik itu melalui a). *Pendidikan formal*, b). *Pelatihan Klasikal* dan c). *Pelatihan non-klasikal*. Sehingga menjadikan ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik.

b) Jenis Kelamin

Jenis kelamin memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap cara organisasi dalam mengelola SDM, membentuk budaya kerja, dan merumuskan kebijakan. Berdasarkan data gender ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tersaji kondisi sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.2
Kondisi ASN Bapperida Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data diolah

Dari gambar 2.2 dapat disajikan data dan informasi bahwa ASN yang berjenis kelamin Pria sebanyak 34 orang dengan persentase 50% dari jumlah total keseluruhan, adapun ASN Wanita berjumlah 34 orang dengan persentase 50%. Kesetaraan jumlah ini menunjukkan komitmen Bapperida terhadap prinsip nondiskriminasi dan *inklus*i. Adanya keseimbangan ini berdampak positif pada dinamika kerja, karena ide dan perspektif dari kedua gender dapat terwakili secara merata.

c) Berdasarkan Pangkat dan golongan

Untuk memastikan sistem karier yang adil, transparan, dan terstruktur ASN pada. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, mendorong profesionalisme, dan memberikan penghargaan yang sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab melalui kondisi pangkat dan golongan ASN. Adapun Kondisi ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pangkat dan golongan, tersaji pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rekapitulasi ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/ Jabatan	Golongan	Jumlah	Ket.
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	PNS
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	PNS
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	2	PNS
4.	Pembina	IV/a	3	PNS
5.	Penata Tingkat I	III/d	6	PNS
6.	Penata	III/c	6	PNS
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	22	PNS
8.	Penata Muda	III/a	5	PNS
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	2	PNS
10	Pengatur	II/c	3	PNS
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	PNS
12	Penata Layanan Operasional	Gol. IX	11	PPPK
13	Pengelola Layanan Operasional	Gol. VII	2	PPPK
14	Operator Layanan Operasional	Gol. V	5	PPPK
	Jumlah		**68**	

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaiaan Bapperida, 2025

Berdasarkan rekapitulasi diatas komposisi golongan dan pangkat pada Pegawai Bapperida Provinsi Kalimantan Utara memperlihatkan bahwa mayoritas pegawai masih terkonsentrasi pada golongan III, khususnya Golongan III/b pangkat Penata Muda Tingkat I, sehingga secara struktur kepegawaian masih didominasi oleh pegawai pada jenjang pelaksana dan penyelia. Hal ini juga menunjukkan perlu adanya potensi pengembangan karier ke tingkat yang lebih tinggi melalui pembinaan dan promosi jabatan. Selain itu pada tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bapperida menunjukkan sebaran pada beberapa golongan, Komposisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai PPPK berada pada Golongan IX dengan persentase 65%, sementara Golongan V sebesar 25%, dan Golongan VII sebesar 10%. Dominasi pegawai pada Golongan IX menggambarkan adanya tenaga dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di perangkat daerah.

Secara keseluruhan berdasarkan data rekapitulasi komposisi PNS dan PPPK diatas mencerminkan adanya pola distribusi yang saling melengkapi, PNS mendominasi jenjang pelaksana hingga struktural menengah, sementara PPPK lebih banyak pada jabatan fungsional tertentu. Hal ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM aparatur, baik melalui pembinaan karier PNS maupun optimalisasi pemanfaatan PPPK sesuai keahliannya sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perencanaan pembangunan, serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara.

2) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam sebuah organisasi pada dasarnya menjadi modal pendukung utama untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu sarana prasarana yang baik akan mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas, mempercepat proses kerja, serta mengurangi hambatan teknis yang berpotensi mengganggu pencapaian target. Dengan demikian, sarana prasarana berfungsi sebagai *enabler* yang memungkinkan sumber daya manusia bekerja secara optimal. Adapun kondisi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana Bapperida Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana Prasarana	Kondisi		Bezzeting	Kebutuhan
		Layak	Tidak Layak		
1	Kendaraan Dinas Bermotor R4	7	-	7	9
2	Kendaraan Dinas Bermotor R2	22	-	22	26
3	Kendaraan Dinas Pick Up R4	3	-	3	3
4	Lemari Es	3	-	3	3
5	AC	1	-	1	1
6	Filling Besi/ Metal	20	2 Musnah	18	20
7	Filling Kayu	10	-	10	10
8	Brankas	1	-	1	1
9	Lemari Makan	1	-	1	1
10	Lemari Besi	11	-	11	11
11	Rak Kayu	2	-	2	2
12	AF Generator Tone Generator	2	-	2	2
13	Mesin Hitung / Jumlah Lain	1	-	1	1
14	Alat Penghacur Kertas	6	0	6	12
15	Alat Pemotong Kertas	1	-	1	1
16	Kipas Angin	4	1 Rusak Berat	3	3
17	Kompor Gas	1	-	1	1
18	Tabung Gas	1	-	1	1
19	Gorden/ Tirai	44	-	44	44
20	Peralatan Personal Komputer	9	-	9	9
21	Kursi Depan Meja Kerja Pejabat	20	-	20	20
22	Mikroskop dengan Kamera	8	-	8	8
23	TV Monitor	6	2 Rusak (Service)	4	6
24	Recorder	2	-	2	2
25	Alat Olahraga Lainnya	1	-	1	1
26	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Pengadaan Meubel 3 Ruang Rapat)	1	-	1	1
27	Camera + Attacment	3	-	3	3

No.	Sarana Prasarana	Kondisi		Bezzeting	Kebutuhan
		Layak	Tidak Layak		
28	Proyektor + Attacment	6	-	6	6
29	Compact Disc Player	1	-	1	1
30	Microphone / Wireless Mic	1	-	1	1
31	Power Supply (UPS)	9	-	9	9
32	Peralatan Studio Visual Lain	1	-	1	1
33	Mesin Jilid	1	-	1	1
34	Mesin Press	1	-	1	1
35	Faximile	2	-	2	2
36	Wireless Amplifier	1	-	1	1
37	Printer	87	-	87	91
38	Note Book	63	2 Musnah	61	63
39	Scanner	2	-	2	2
40	Line Printer	1	1 Rusak	0	1
41	Peralatan Komputer Mainframe	2	-	2	2
42	PC Unit	39	-	39	39
43	Televisi	3	-	3	3
44	Amplifiler	1	-	1	1
45	Loundspeaker	1	-	1	1
46	Tangga Aluminium	1	-	1	1
47	Hard Disk	10	-	10	10
48	Handycam	6	-	6	6
49	Perkakas Kantor	1	-	1	1
50	Whiteboard	3	-	3	3
51	Camera Video	6	-	6	6
52	HT	5	-	5	5
53	Drone	2	-	2	2
54	Mesin Absensi	1	-	1	1
55	Lemari Kayu	2	-	2	2
56	Kursi Tamu	2	-	2	2
57	Mesin Ketik Manual	2	2 Rusak	0	0
58	Dispenser	4	-	4	4
59	GPS	4	-	4	4
60	Papan Nama Instansi	1	-	1	1
61	Troly Dorong	1	-	1	1
62	Plotter	1	-	1	1
63	Papan Struktur Organisasi	1	-	1	1
64	Aplikasi E-Monev	1	-	1	1
65	Aplikasi SIRINDAKU	1	-	1	1
66	Aplikasi Admin Smart Kaltara	1	-	1	1
67	Aplikasi Geo/E-Portal Tematik Kaltara	1	-	1	1

No.	Sarana Prasarana	Kondisi		Bezzeting	Kebutuhan
		Layak	Tidak Layak		
68	Aplikasi SDGs KU	1	-	1	1
69	Aplikasi CIKU	1	-	1	1
70	Website Bappeda dan Litbang	1	-	1	1

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaiaan Bapperida, 2025

Berdasarkan data yang tersedia saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam kondisi cukup memadai. Untuk mempertahan dan meningkatkan aset tersebut dapat berfungsi optimal, perlu dilakukan pengelolaan aset yang tepat, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui Perencanaan kebutuhan, penggunaan aset yang tepat guna, pengamanan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan aset yang tidak layak, serta pengadaan sarana prasarana baru secara bertahap.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, bahwa kinerja layanan yang di berikan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk Meningkatkan kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bapperida yang dulunya masih menggunakan nomenklatur Bappeda dan Litbang telah melaksanakan kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode 2021-2026 dengan realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan (%)	%	95	95	80	85	90	71,49	78,66	85,83	-	-	75,25	82,8	107,2	-	-
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan (%)	%	80	85	85	90	95	72,22	80,7	75,95	-	-	90,28	94,94	89,35	-	-
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah (%)	%	80	85	85	90	95	50	85	100	-	-	62,5	117,6	117,6	-	-
5	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
6	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	%	85	90	95	100	100	85	90	95	-	-	85	100	100	-	-
7	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
8	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	%	80	85	90	95	100	80	85	90	-	-	80	100	100	-	-
10	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100	-	-
11	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100	-	-
12	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100	-	-
13	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
14	Rata-rata capaian Administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
15	Rata-rata capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
16	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
17	Rata-rata capaian pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
18	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
19	Rata-rata capaian pemeliharaan berang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
20	Rata-rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
21	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
22	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian,evalusi laporan Perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
23	Rata- rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
24	Rata-rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
25	Rata- rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
26	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
27	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
28	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	%	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100		-	-
29	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	%	80	85	-	-	-	80	85	-	-	-	100	100		-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
30	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
31	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
32	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
33	Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
34	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
35	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-			100	-	-
36	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	Dok	-	-	4	3	2	-	-	4	-	-			100	-	-
37	Tersedianya Buku Profil Pembangunan daerah	Buku	-	-	3	3	3	-	-	3	-	-			100	-	-
38	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Laporan	-	-	4	4	4	-	-	4	-	-			100	-	-
39	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terkoordinasi penyusunan Dokumen perencanaannya	PD	-	-	23	23	23	-	-	23	-	-			100	-	-
40	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	PD	-	-	9	9	9	-	-	9	-	-			100	-	-
41	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi Penyusunan dokumen perencanaan	PD	-	-	4	4	4	-	-	4	-	-			100	-	-
42	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-			100	-	-
43	Jumlah Laporan hasil penelitian	Laporan	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-			100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																
44	Jumlah Laporan hasil penelitian Dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-			100	-	-
45	Jumlah Laporan hasil Pengembangan inovasi dan teknologi	Laporan	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-			100	-	-

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	2.800.066.238	3.974.584.214	5.262.295.786	2.679.428.391	2.914.239.090	4.767.226.990	95,69	73,32	90,59		
2	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	1.651.723.920	2.914.239.090	3.545.896.522	1.544.191.079	2.191.083.608	3.007.460.950	93,49	75,19	84,82		
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	419.367.659	733.746.182	803.168.165	356.954.800	693.719.003	772.757.251	85,12	94,54	96,21		
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	1.483.900.000	5.294.681.492	5.863.475.000	1.412.987.448	4.186.759.944	3.019.873.639	95,22	79,07	51,5		
5	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	15.018.636.713	18.258.393.320	17.853.104.619	12.907.694.331	14.099.452.728	14.882.836.541	85,94	77,22	83,36		
6	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	1.651.723.920	2.914.239.090	3.545.896.522	1.544.191.079	2.191.083.608	3.007.460.950	93,49	75,19	84,82		
7	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.800.066.238	3.974.584.214	5.262.295.786	2.679.428.391	3.010.814.211	4.767.226.990	95,69	75,75	90,59		
8	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	1.903.267.659	6.028.427.674	6.666.643.165	1.769.942.248	4.880.478.947	3.792.630.890	92,99	80,96	56,89		
9	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.599.834.249	3.546.279.924		1.059.364.156	2.186.415.799		66,22	61,65			
10	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.506.570.406			2.182.179.531			62,23		
11	Rata-rata capaian Administrasi keuangan perangkat daerah	9.675.461.195	9.874.341.195		8.784.701.622	8.094.264.094		90,79	81,97			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
12	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.074.006.062			8.015.790.975			88,34		
13	Rata-rata capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	230.450.000	355.000.000		129.031.280	110.677.937		55,99	31,18			
14	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			479.275.000			325.924.382			68,00		
15	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.493.263.569	2.369.255.201		1.300.795.428	2.020.402.317		87,11	85,28			
16	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.428.433.283			2.124.164.904			87,47		
17	Rata-rata capaian pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-		-	-						
18	Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			245.000.000,00			244.729.900,00			99,89		
19	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.377.935.400	1.483.053.000		1.255.336.839	1.265.302.231		91,10	85,32			
20	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.564.247.368			1.458.430.739			93,24		
21	Rata-rata capaian pemeliharaan berang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	641.692.300	630.464.000		378.465.006	422.390.350		58,98	67,00			
22	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			555.572.500			531.616.110			95,69		
23	Rata-rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	514.867.000	1.730.120.000		432.903.688	1.212.063.791		84,08	70,06			
24	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun			2.136.830.862			2.036.962.230			95,33		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
25	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan	681.882.500	619.281.860		673.806.904	495.836.191		98,82	80,07			
26	Tersedianya Buku Profil Pembangunan daerah			442.500.000			333.770.026			75,43		
27	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian,evalusi laporan Perencanaan pembangunan daerah	454.974.420	564.837.230		437.480.487	483.183.626		96,15	85,54			
28	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			966.565.660			636.728.694			65,88		
29	Rata- rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1.519.748.741	1.476.216.285		1.439.569.288	1.136.701.393		94,72	77,00			
30	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terkoordinasi penyusunan Dokumen perencanaannya			1.916.802.280			1.716.417.690			89,55		
31	Rata-rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	649.903.497	1.226.033.005		642.816.091	1.099.259.811		98,91	89,66			
32	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya			1.742.715.582			1.507.281.639			86,49		
33	Rata- rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	630.414.000	1.272.334.924		597.043.012	774.853.007		94,71	60,90			
34	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi Penyusunan dokumen perencanaan			1.602.777.924			1.543.527.661			96,30		
35	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan	1.483.900.000	5.294.681.492		1.412.987.448	4.186.759.944		95,22	79,07			
36	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			3.690.475.000			2.598.872.348			70,42		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
37	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	0	-		-	-						
38	Jumlah Laporan hasil penelitian Dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			-			-					
39	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	0	-		-	-						
40	Jumlah Laporan hasil penelitian Dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.173.000.000			421.001.291			19,37		
41	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	419.367.659	733.746.182		356.954.800	693.719.003		85,12	94,54			
42	Jumlah Laporan hasil Pengembangan inovasi dan teknologi			803.168.165			772.757.251			96,21		

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.5 dan tabel 2.6 data target dan realisasi kinerja pelayanan perangkat daerah periode 2021-2026, menyajikan informasi sebagai berikut,

1) Sasaran kinerja Meningkatkan kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah,
   a. Sasaran kinerja meningkatkan kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan dan Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan;
   b. Hasil realisasi kinerja dibandingkan dengan target menunjukan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 kinerja belum tercapai akan tetapi pada tahun 2024 realisasi kinerja menunjukan kinerja tercapai dibandingkan target yang ditetapkan;
   c. berdasarkan rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 menunjukan kinerja telah memenuhi kriteria tinggi dalam penilaian kinerja, dimana pada tahun 2022 rata-rata realisasi kinerja sebesar 85,74% dibanding rata-rata target sebesar 97,5%, kemudian pada tahun 2023 rata-rata kinerja meningkat sebesar 89,33% dibanding rata-rata target sebesar 97,5% dan tahun 2024 terdapat penyesuaian target menjadi 90% dengan rata-rata kinerja sebesar 92,91%, secara umum menunjukkan kinerja yang terus meningkat dalam mencapai sasaran dan tujuannya, melalui peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun.
   d. dalam pelaksanaan kinerja tersebut dari tahun 2022-2024 didukung dengan penganggaran yang bervariasi nominalnya, mengingat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan prioritas pembangunan. Pada pelaksanaan kinerja dan anggaran pada sasaran Meningkatkan kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah terserap anggaran dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 94,59%, hal tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh anggaran digunakan. Ini mengindikasikan pelaksanaan program yang agresif dan sesuai rencana, kemudian pada tahun 2023 rata-rata rasio sebesar 74,25%, terjadi penurunan dari tahun 2022, hal tersebut sebagai upaya efisiensi, di mana PD mampu meningkatkan kinerja (dari 85,74% menjadi 89,33%) dengan anggaran yang jauh lebih hemat dan pada tahun 2024 rata-rata rasio sebesar 87,70%, bahwa PD berhasil mencapai kinerja tertinggi dengan memanfaatkan anggaran yang lebih optimal.

2) Sasaran kinerja Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan,
   a. Sasaran kinerja yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan dan Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah;
   b. Hasil realisasi kinerja dari tahun dibandingkan dengan target menunjukan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 kinerja belum tercapai,

kemudian pada tahun 2024 realisasi kinerja menunjukan kinerja tercapai dibandingkan target yang ditetapkan;

c. Berdasarkan rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 menunjukan kinerja masih pada kriteria sedang-tinggi dalam penilaian kinerja, dimana terlihat ada tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dimana pada tahun 2022 ke tahun 2023: terjadi peningkatan kinerja yang substansial sebesar 21,74% (dari 61,11% menjadi 82,85%). Ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam mencapai target dan sasaran, kemudian dari tahun 2023 ke 2024, Kinerja terus meningkat, meskipun dengan laju yang lebih kecil, yaitu 5,12% (dari 82,85% menjadi 87,97%), secara umum data kinerja menunjukkan bahwa Bapperida memiliki kinerja yang terus membaik dan semakin efektif walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya komprehensif untuk memperbaiki kinerja pada sasaran ini sehingga fungsi penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan dapat optimal dimanfaatkan dalam pembangunan;
d. Pada pelaksanaan kinerja dan anggaran pada sasaran Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan terserap anggaran dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 90,17%, kemudian pada tahun 2023 sebesar 86,81% dan tahun 2024 sebesar 73,86%. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi tren penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2024, hal tersebut menunjukan bahwa penyerapan anggaran belum maksimal untuk mendukung kinerja, serta diakibatkan proses penganggaran yang tidak sinkron dengan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan batal atau tertunda.

3) Faktor Pendukung

a. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
b. dukungan sumber daya manusia yang handal dan sarana prasarana yang memadai;
c. pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan yang tepat sasaran dan dukungan pendanaan yang optimal;
d. Dukungan instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala yang optimal;
e. pemanfaatan data dan informasi yang optimal;
f. lingkungan kerja yang kondusif;
g. komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
h. SDM Bapperida yang adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan;
i. kolaborasi dan Koordinasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sangat baik.

4) Faktor Penghambat

a. belum tercukupinya kuantitas ASN yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja;

b. masih terdapat SDM dengan kapasitas yang kompetensinya belum memadai;
c. komitmen Perangkat Daerah masih rendah terhadap pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian dan evaluasi;
d. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses, mutahir berbasis satu data;
e. belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan berdampak;
f. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman PD terhadap penyelenggaraan inovasi daerah;
g. iklim inovasi di daerah belum kondusif, rendahnya alokasi anggaran, tidak ada regulasi insentif, dan terbatasnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem inovasi;
h. kerja sama riset antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta masih terbatas;
i. diseminasi hasil riset masih minim, rendahnya frekuensi forum publikasi, sosialisasi, dan penggunaan media digital untuk menyebarluaskan temuan riset.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Kelompok sasaran pelayanan mencerminkan upaya strategis untuk menjamin bahwa setiap proses Program, Kegiatan, sub kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan penerima layanan dan kepentingan daerah. Bapperida Provinsi Kalimantan Utara memiliki kelompok sasaran adalah Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakat.

Berdasarkan layanan yang diberikan bersifat koordinatif, konsultatif, informatif dan fasilitatif melalui kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan, musrenbang, pelaksanaan asistensi-verifikasi, monitoring dan evaluasi, fasilitasi riset dan inovasi daerah, serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Adapun Kelompok sasaran layanan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan layanan yang diberikan oleh masing-masing bidang tersaji pada tabel berikut ini,

Tabel 2.7
Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat daerah 3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi kepegawaian, 4. Penataan dan Pengelolaan Administrasi keuangan	• Seluruh ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara • Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		5. Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat daerah	• Bappeda dan Litbang Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara • Masyarakat
2	Bidang Perekonomian dan SDA	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 2. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan 3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Fasilitasi pertemuan lainnya berkaitan dengan urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	• Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA : ✓ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ✓ Dinas Pariwisata ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPTD ✓ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta UPTD ✓ Dinas Kehutanan serta UPTD ✓ Dinas Lingkungan Hidup serta UPTD ✓ Dinas Energi Sumber Daya Mineral ✓ Biro Perekonomian • Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota • Asosiasi dan lembaga lainnya berkaitan dengan Perekonomian dan SDA
3	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (ATS, SDGS, Kemiskinan, Penyandang Disabilitas) 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Koordinasi Sosial Budaya dan Pemerintahan 3. Fasilitasi Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Kalimantan Utara 4. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Laporan (TPB/SDGs, Kemiskinan, Germas, Disabilitas, ATS, Stunting)	• Perangkat Daerah Pengampu SDGs • Perangkat Daerah Bidang Koordinasi Sosial Budaya dan Pemerintahan • Kelompok Jaringan Masyarakat Sipil • Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara • Perangkat Daerah Pengampu Kemiskinan • Perangkat Daerah Pengampu Anak Tidak Sekolah
4	Pengkajian Perencanaan dan	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	• Pemerintah Pusat • Pimpinan Daerah

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
	Pengendalian Pembangunan	2. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan 3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Koordinasi terkait tata kelola data 6. Pelaksanaan Orientasi RKPD dan RPJMD 7. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal (RKPD dan RPJMD) 8. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah (Renja PD dan Renstra PD) 9. Pelaksanaan Musrenbang Rancangan (RKPD dan RPJMD) 10. Penyusunan Dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Perubahan RPJMD, Rantek RPJMD dan RPJMD 11. Sosialisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD 12. Koordinasi Penyusunan Dokumen Renja, Perubahan Renja dan Renstra Perangkat Daerah 13. Verifikasi Usulan Pokir dan Usulan Kab/Kota 14. Verifikasi Dokumen Ranwal (Renja dan Renstra) dan Ranhir (Renja dan Renstra) 15. Koordinasi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pusat 16. Koordinasi Rakor Gubernur 17. Koordinasi Musrenbang Nasional	• DPRD • Instansi vertikal • Seluruh Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara • Pemerintah Kabupaten/Kota • Bappeda dan Litbang Regional Kalimantan • Masyarakat
5	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan (Urusan ke-PU-an, tata ruang dan pertanahan, pengembangan wilayah, kebencanaan, kawasan perbatasan dan urusan perhubungan) 2. Asistensi/verifikasi penyusunan dokumen perencanaan terutama perangkat	• Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan : ✓ Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman ✓ Dinas Perhubungan dan UPTD ✓ Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		daerah koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan (Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan dan UPTD, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah terutama perangkat daerah koordinasi Bidang PPW (Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan dan UPTD, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Urusan ke-PU-an, penataan ruang dan pertanahan, pengembangan wilayah, kebencanaan, kawasan perbatasan dan urusan perhubungan. 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan ke-PU-an, penataan ruang dan pertanahan, pengembangan wilayah, kebencanaan, kawasan perbatasan dan urusan perhubungan dengan perangkat daerah koordinasi Bidang PPW (Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan dan UPTD, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 5. Fasilitasi koordinasi/pertemuan lainnya berkaitan dengan urusan Urusan ke-PU-an, penataan ruang dan pertanahan, pengembangan wilayah, kebencanaan, kawasan perbatasan dan urusan perhubungan, baik dengan Kab/Kota, Provinsi lain, Kementerian/Lembaga maupun dengan para mitra pembangunan.	✓ Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) ● Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota ● Asosiasi dan lembaga lainnya berkaitan dengan urusan Urusan ke-PU-an, penataan ruang dan pertanahan, pengembangan wilayah, kebencanaan, kawasan perbatasan dan urusan perhubungan
6	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah 2. Pengelolaan Data dan Informasi Riset dan Inovasi 3. Pendampingan dan bimbingan teknis pengelolaan riset dan inovasi daerah	● Perangkat Daerah Bidang Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah ● Perangkat daerah se Kalimantan Utara ● Perguruan Tinggi, UMKM, NGO dan komunitas inovator ● Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		4. Diseminasi dan Promosi Hasil Riset dan Inovasi	• masyarakat

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus penyelenggaraan pelayanan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dengan fokus masing-masing bidang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. kelompok sasaran pelayanan dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang disusun oleh Bapperida tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan Perangkat daerah dan berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada kelompok sasaran, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan dengan para pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk membantu menyampaikan atau memfasilitasi pelaksanaan layanan dan program kepada kelompok sasaran, sehingga kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang disusun oleh Bapperida dapat tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang optimal. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, masyarakat, dan media yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta pemanfaatan riset dan Inovasi Daerah. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, yang tersaji pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Mitra Pelayanan Perangkat daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	BKAD	1. sinkronisasi Pendanaan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2. Pengembangan model pembiayaan Strategis dan Inovatif 3. Tersedianya data proyeksi pembiayaan daerah	. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD . Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
2	Sekretariat DPRD,	keselarasan pokok pikiran DPRD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
3	Badan Pendapatan Daerah	Tersedianya data proyeksi pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
4	Biro Hukum	Terlaksananya harmonisasi dan fasilitasi penetapan produk hukum daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR-Perkim, BPBD	penyelarasan dengan dengan dokumen spasial, tematik, dan strategis lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
6	Inspektorat	1. Integrasi dengan analisis resiko PD 2. Terlaksananya reviu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Biro Perekonomian	1. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah 2. Pengembangan Kerangka dan Strategi Investasi dan kerjasama Pembangunan	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
8	Biro Organisasi	1. keselarasan kinerja PD dalam mendukung sasaran pembangunan daerah 2. Penataan tatalaksana dengan proses bisnis layanan dan SOP Pelaksanaan Tugas dan fungsi yang sesuai ketentuan	1. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD 2. Memadainya pelayanan kepegawaian dan Administrasi Umum PD

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
9	DKISP dan BPS	1. Pembinaan Data Hasil Pembangunan 2. Publikasi dan Aksesbilitas terhadap data pembangunan	Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data
10	Biro Administrasi Pembangunan	Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
11	Seluruh Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	tersusunnya dokumen RPJMD, RKPD, Laporan Evaluasi RKPD dan RPJMD
12	Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, dan Pusbindiklatren Bappenas RI, LAN	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi 2. Terpenuhinya kuantitas, kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan SDM	Meningkatnya pelayanan kepegawaian dan Administrasi Umum PD
13	Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Inovasi daerah 2. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan inovasi berbasis riset yang komprehensif 3. Kerjasama antara Pemerintah. Perguruan tinggi dan sektor swasta	1. Meningkatnya kualitas riset daerah 2. Meningkatnya tata kelola Inovasi di daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
14	GGGI, GIZ, SKALA, YKAN	Optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah

Sumber: data diolah, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Mitra-mitra tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengambilan keputusan berbasis data, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, tepat waktu, dan berdampak.

2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah daerah yang ditindaklanjut oleh Perangkat daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan penerima alokasi pemanfaatan dana *Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2* berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan hal tersebut Bepperida Provinsi Kalimantan Utara sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan mendapat tanggung jawab membantu pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Provinsi Kalimantan Utara melalui kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dengan data dan informasi sebagai berikut,

Tabel 2.9
Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

No	Mitra	Nomor	Jangka Waktu	Perihal/Tentang
1	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	173/PKS/YKAN/ ITP/VII/2025 000.8.7.3/723/BAPP -LIT/VII/2025	3 Tahun	Kerjasama Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2

Sumber : Bapperida Provinsi Kalimantan Utara (2025)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kondisi atau situasi yang mengandung kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau suatu hambatan yang perlu dipecahkan agar tujuan dapat tercapai. Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang Penelitian dan pengembangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dan uraikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut,

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan RPJMD 2025-2029	Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang mempengaruhi
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	perencanaan pembangunan daerah belum optimal dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan daerah belum terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan baik/optimal	1) dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi, tersusun sesuai tahapan dan tepat waktu 2) Keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan nasional 3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD dengan Pembangunan Daerah 4) kontribusi kinerja Kab/Kota dalam mendukung sasaran pembangunan provinsi 5) Sumber-sumber pendanaan inovatif dan kolaboratif belum dimanfaatkan secara optimal 6) Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses, mutahir berbasis satu data

Permasalahan RPJMD 2025-2029	Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang mempengaruhi
		pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	1) Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) belum optimalnya sistem informasi dalam pengendalian dan evaluasi yang efektif 3) tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah tepat waktu
	Rendahnya tingkat Pemanfaatan hasil riset dan Inovasi Daerah	Tingkat penyelenggaraan inovasi di daerah masih rendah, ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam program pembangunan dan layanan publik	1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi di daerah masih terbatas, ditunjukkan oleh minimnya program pelatihan, inkubasi, serta dukungan teknis yang berkelanjutan bagi pelaku inovasi lokal. 2) Rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan inovasi belum berbasis data riset yang komprehensif dan belum dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan daerah. 3) Iklim inovasi di daerah tidak kondusif, terlihat dari rendahnya alokasi anggaran, tidak ada regulasi insentif, dan terbatasnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem inovasi.
		Pelaksanaan riset belum memenuhi standar kualitas, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah riset yang terpublikasi di jurnal terakreditasi atau berdampak langsung pada kebijakan dan program pembangunan	1) Riset daerah tidak berorientasi pada isu-isu strategis lokal, sehingga hasil riset tidak relevan terhadap kebutuhan pembangunan daerah. 2) Kerja sama riset antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta masih terbatas, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah riset kolaboratif lintas sektor. 3) Data dan informasi hasil riset tidak terdokumentasi secara sistematis dan belum tersedia dalam sistem yang terbuka serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 4) Diseminasi hasil riset masih minim, terbukti dari rendahnya frekuensi forum publikasi, sosialisasi, dan penggunaan media digital untuk menyebarluaskan temuan riset.
		Dukungan pelayanan penunjang perangkat daerah belum memadai	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan dimanfaatkan

Permasalahan RPJMD 2025-2029	Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang mempengaruhi
			2) Penatausahaan Keuangan PD sesuai regulasi 3) Belum memadainya pelayanan kepegawaian dan administrasi umum PD 4) peningkatan kompetensi ASN

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Menurut Dutton dalam Asrar (2018), menyebutkan bahwa Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren-tren yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Isu Strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, karena bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka menengah atau panjang dan mempengaruhi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruh daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang.

Bapperida Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan dibidang penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi Daerah) untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data dan bukti untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan telahaan terhadap potensi, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS RPJMD, Isu lingkungan dinamis yaitu global, nasional, regional atau daerah terindentifikasi dan terinventarisasi isu strategis pelayanan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Penentuan Isu Strategis Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL/DAERAH	
Berdasarkan UU. Nomor 25 tahun 2004 UU. No. 23 tahun 2014 UU. No. 11 tahun 2019 Perpres 78 Tahun 2021 Permendagri No. 86 Tahun 2017 • Memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan seluruh perangkat daerah sehingga berpotensi menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah; • Memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan dibidang riset dan inovasi daerah • Ketersediaan sumber daya berupa sumber daya manusia, dan sarana prasarana • Potensi bonus demografi • Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan • Keberadaan ekosistem mangrove dan gambut • Potensi parawisata alam dan budaya • Potensi pengembangan EBT	• perencanaan pembangunan daerah belum optimal dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah	• belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis • Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar • belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor-sektor ekonomi basis/ unggulan	• Pergeseran tata kelola keuangan global • Perkembangan Teknologi • Ancaman degradasi lingkungan dan deforestasi serta perubahan iklim	• **Prioritas Nasional 7 RPJMN** : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan • Tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	perencanaan pembangunan daerah belum optimal dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL/DAERAH	
	• Tingkat penyelenggaraan inovasi di daerah masih rendah • Pelaksanaan riset belum memenuhi standar kualitas					Pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan

BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Kemudian dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menjelaskan bahwa Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan mandat pembentukan perangkat daerah yang tertuang dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta dukungan pada pencapaian tujuan, sasaran atau outcome RPJMD Pemerintah Daerah. Kemudian dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah menggunakan mekanisme cascading dan dapat bersifat *direct cascading* dan atau *cause effect cascading.*

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 memuat kondisi umum yang akan diwujudkan selama periode pembangunan jangka menengah dan agenda pembangunan dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan. Adapun Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029 adalah,

“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi RPJMD dicapai melalui pelaksanaan misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD juga merupakan transformasi dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara substansi selaras dengan misi pembangunan jangka panjang daerah. terdapat 8 (delapan) misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut,



Dalam rangka manajemen pelaksanaan visi maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 melalui proses *cascading* yang menghasilkan 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran, 4 (empat) indikator tujuan dan 20 (dua puluh) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut,

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya daya saing daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai		**Indeks Daya Saing Daerah**
		Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau
		Indeks Ekonomi Biru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Beranda Depan NKRI		
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia
	Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah
	Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks Pembangunan Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Gender
Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		**Indeks Reformasi Birokrasi**
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	Nilai SAKIP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks inovasi Daerah
		Survei Penilaian Integritas KPK
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		**Indeks Kesejahteraan Sosial**
	Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	Rasio Gini
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Tingkat kemiskinan
	Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase Desa Wilayah Perbatasan yang Berstatus Maju dan Mandiri
Meningkatnya ketahanan ekologi		**Penurunan Intensitas Emisi GRK**
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) berkontribusi pada Misi ke-3 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yakni Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif, dengan menunjang pada tujuan dan sasaran sebagai berikut,

Tujuan : *"Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas"*
Sasaran : *"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani"*

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bapperida Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas untuk

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

Memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat daerah, isu strategis dan kontribusi pada tujuan, sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara maka dirumuskan tujuan strategis Bapperida Provinsi Kaliamantan Utara yaitu, *"Terwujudnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi hasil berbasis riset dan Inovasi"*. Dengan rumusan sasaran dan indikator kinerja Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut,

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, dan inovatif melayani **NSPK** - UU. No. 25 tahun 2004 - UU. No. 23 tahun 2014 - UU. No. 11 tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2021 - Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Permendagri No. 5 Tahun 2017 - Permendagri No. 7 Tahun 2023	Terwujudnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi hasil berbasis riset dan Inovasi		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	86,18	87,00	87,50	87,80	88,00	88,50	88,90	
			Indek Inovasi Daerah	Indeks	53,35	58,45	60,01	61,00	62,40	65,01	66,30	
			Tingkat capaian sasaran RPJMD	Persen	89,95	90,00	92,50	94,00	96,50	98,00	98,50	
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	22,75	23,55	23,85	24,14	24,47	24,59	24,70	
			Tingkat capaian sasaran RKPD	Persen	88,69	90,00	92,50	94,00	96,50	98,00	98,50	
		Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	persentase jumlah produk inovasi yang di manfaatkan	Persen	N/A	78	80	83	86	90	91	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dan inovasi daerah dalam pembangunan daerah	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	13	38	50	63	75	87	100	
		Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola Pelayanan PD yang efektif, efisien dan akuntabe**l**	Nilai SAKIP PD	Nilai	85,56	86,5	87,0	88,0	88,5	89,0	90	

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Dalam Pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat daerah diperlukan strategi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penyusunan Strategi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada rumusan Strategi RPJMD 2025-2029 dan Isu Permasalahan serta kebutuhan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 tersaji rumusan strategi sebagai berikut,

Tabel 3.3
Strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Percepatan pertumbuhan Ekonomi inklusif berbasis Optimalisasi potensi daerah	Pembangunan wilayah yang merata, SDM berkarakter dan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur	Pembangunan SDM unggul dan sentra ekonomi hijau menuju Kaltara sebagai beranda NKRI yang berkelanjutan	Kemajuan pembangunan segala bidang menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berdaya saing	Perwujudan fondasi transformasi yang kokoh untuk Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan

Sumber : RPJMD Prov. Kaltara Tahun 2025-2029

Dalam upaya mendukung Strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dan tahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangakat daerah, maka Bapperida Provinsi Kalimantan Utara merumuskan strategi sebagai berikut;

Tabel 3.4
Penahapan Strategi PD Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung isu Percepatan pertumbuhan Ekonomi inklusif berbasis Optimalisasi potensi daerah	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung isu Pembangunan wilayah yang merata, SDM berkarakter dan ekonomi bernilai tambah	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung yang mendukung isu Pembangunan SDM unggul dan sentra ekonomi hijau	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung yang mendukung isu Kemajuan pembangunan segala bidang	Mewujudkan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi hasil berbasiskan riset dan inovasi dalam Perwujudan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh

Sumber : data diolah

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun arah kebijakan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun mendatang, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1. UU. No. 25 tahun 2004 2. UU. No. 23 tahun 2014 3. UU. No. 11 tahun 2019 4. Perpres 78 Tahun 2021 5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 6. Permendagri No. 5 Tahun 2017 Permendagri No. 7 Tahun 2023 7. Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 8. Pergub Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2025	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah 3. Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 4. Peningkatan kerjasama pembangunan daerah 5. Peningkatan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah 6. Memperkuat sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi pembangunan antar pusat dan daerah 7. Optimalisasi potensi pembiayaan alternatif 8. Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan kesuaian isu pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang; 2. meningkatkan keselarasan isu pembangunan dengan dokumen perencanaan spasial, tematik dan kajian lingkungan dan dokumen strategis lainnya; 3. Optimalisasi pemanfaatan satu data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif, akuntabel dan tepat waktu serta berbasis teknologi informasi; 5. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional; 6. Meningkatkan keselarasan kinerja dan dukungan program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah melalui verifikasi dan pengendalian dokumen perencanaan PD; 7. Optimalisasi keselarasan kinerja antar perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui Forum lintas PD dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan; 8. optimalisasi dukungan kinerja Kabupaten/ kota dalam

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
		mendukung pembangunan Provinsi dan nasional; 9. Optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; 10. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan alternatif dan kolaboratif; 11. Meningkatkan kualitas riset daerah melalui pelaksanaan riset berdasarkan isu strategis daerah, pengembangan produk unggulan daerah, dan riset yang mendukung penguatan inovasi daerah dan kerjasama dan kemitraan riset serta Diseminasi hasil riset daerah 12. Meningkatkan tata kelola inovasi daerah melalui pembinaan dan pengembangan inovasi di daerah, dan menumbuhkan Iklim inovasi di daerah; 13. Meningkatkan kuantitas, kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan SDM melalui Koordinasi pengadaan, Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis; 14. Optimalisasi Sistem kerja dan penataan tatalaksana organisasi.

Sumber : data diolah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam rangka perwujudan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian tertuang dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil (*outcome)* suatu program. Sedangan subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Perumusan Program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra tahun 2025-2029 merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcame* dan output, serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. untuk memastikan langkah operasional yang tepat dalam rangka mencapaian tujuan strategis perangkat daerah dan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun teknik dan rumusan program, kegiatan dan subkegiatan, serta dukungan terhadap Program Prioritas Pembangunan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah							
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	**Terwujudnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi hasil berbasis riset dan inovasi**				**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)**		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
					Tingkat capaian sasaran RPJMD (%)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)		
					Nilai Komponen Perencanaan kinerja Pemda (Nilai)		
					Tingkat capaian sasaran RKPD (%)		
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Tingkat capaian program pembangunan daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
				Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.1.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.1.02.0004 - Penyusunan Profil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Pembangunan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.1.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terwujudnya keselarasan kinerja Kabupaten/ Kota dalam mendukung sasaran pembangunan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Daerah			Persentase produk inovasi daerah yang di manfaatkan (%)		
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Riset di Daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.1.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
				Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan di bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.1.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.1.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.1.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
				Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan dibidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.1.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
				Terlaksananya Diseminasi hasil riset daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.1.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.1.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya Pertumbuhan Inovasi Daerah		Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Inovasi di daerah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.1.02.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
				Menumbuhkan iklim inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0009 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
		Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Perangkat Daerah yang			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Efektif, Efisien dan Akuntabel					
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya layanan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya layanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya layanan Administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Kepegawaian PD yang sesuai standar regulasi	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah perangkat daerah yang sesuai dengan standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya layanan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD PD yang sesuai regulasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcame dan output Perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yaitu 5 Program, 19 Kegiatan dan 83 Subkegiatan. Dengan uraian program sebagai berikut,

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam wujud operasional melalui 3 Kegiatan dan 10 Subkegiatan yang meliputi pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Konsultasi publik, Musyawarah Pembangunan Provinsi (Musrenbang), Kemudian pelaksanaan kegiatan analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan perencanaan pembangunan disusun berbasis data yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data serta pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi perencanaan Pembangunan daerah baik itu Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi maupun fasilitasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta pengendalian kerjasama daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu program yang berkontribusi terhadap kinerja meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan memastikan subtansi kualitas, dalam wujud operasional 3 Kegiatan dan 24 Subkegiatan melalui pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan perangkat daerah dengan Perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat selaras antar perangkat daerah, tepat sasaran, dan terciptanya kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Melalui pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional yang meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan berbasis pendekatan subtantif yaitu tematik, holistik dan spasial sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga dapat efektif, efisien, tepat sasaran, tepat wilayah dan tepat dalam menyelesaikan masalah.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas riset di daerah yang mana difokuskan untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah yang berbasis pada kelitbangan terapan dan tematik, dengan menempatkan hasil penelitian sebagai fokus utama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penelitian dijalankan secara sistematis untuk memberikan rekomendasi dan masukan pada tahap awal penyusunan kebijakan, menjadi katalisator pencapaian sasaran pembangunan, serta alat evaluatif terhadap kinerja perangkat daerah.

Program ini menjalankan fungsi kelitbangan sebagai elemen strategis dalam pencapaian visi-misi pembangunan daerah secara menyeluruh, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program didukung oleh data dan kajian yang valid sesuai arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diamanatkan dalam RIPJPID 2025–2029. Adapun wujud operasional pelaksanaan program ini melalui 4 kegiatan dan 14 Subkegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil *outcome* program Penelitian dan Pengembangan. Adapun kegiatan tersebut adalah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4) Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Program ini menjadi bagian strategis dari upaya menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kondusif di daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJPID) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029. Melalui program ini, Bapperida berperan penting dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan riset yang terarah pada penyelesaian permasalahan utama daerah serta mendorong pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi, penguatan kerja sama dengan lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan pendanaan riset daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka perwujudan pelaksanaan program di dukung dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan yaitu kegiatan Invensi dan Inovasi.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintah berkontribusi dalam upaya meningkatkan tata kelola Pelayanan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Melalui dukungan manajemen pelayanan organisasi perangkat

daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaraan, evaluasi kinerja, kelembagaan dan tata laksana, sistem kerja, pengembangan kompetensi kepegawaian, layanan pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi teknologi dan infomasi dan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat daerah. Terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program ini, dengan rincian sebagai berikut, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dibutuhkan rumuskan target dan pagu pendanaan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				***26.983.539.001***		***29.125.734.943***		***31.990.504.459***		***32.882.174.701***		***33.253.119.316***		
5.01 - PERENCANAAN				**25.683.552.126**		**27.650.933.496**		**30.333.105.876**		**31.162.174.701**		**31.423.119.316**		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**18.210.260.943**		**19.632.972.665**		**21.339.443.620**		**21.542.930.712**		**20.319.530.712**		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**18.210.260.943**	**100**	**19.632.972.665**	**100**	**21.339.443.620**	**100**	**21.542.930.712**	**100**	**20.319.530.712**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**1.059.728.500**		**1.235.000.000**		**1.565.000.000**		**1.580.000.000**		**1.585.000.000**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.059.728.500	2	1.235.000.000	2	1.565.000.000	2	1.580.000.000	3	1.585.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.009.500		95.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	70.009.500	2	95.000.000	2	95.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000		
5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				140.554.500		280.000.000		285.000.000		290.000.000		295.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	140.554.500	17	280.000.000	17	285.000.000	17	290.000.000	17	295.000.000		
5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				810.000.000		810.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	810.000.000	4	810.000.000	4	1.130.000.000	4	1.130.000.000	4	1.130.000.000		
5.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				39.164.500		50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	39.164.500	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**13.429.876.712**		**13.529.076.712**		**13.539.076.712**		**13.554.076.712**		**13.569.076.712**		
Terpenuhinya layanan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	13.429.876.712	1	13.529.076.712	1	13.539.076.712	1	13.554.076.712	1	13.569.076.712		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	84		84		84		84		84			
5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.769.076.712		12.769.076.712		12.769.076.712		12.769.076.712		12.769.076.712		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	84	12.769.076.712	84	12.769.076.712	84	12.769.076.712	84	12.769.076.712	84	12.769.076.712		
5.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				648.800.000		680.000.000		685.000.000		695.000.000		705.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	648.800.000	1	680.000.000	1	685.000.000	1	695.000.000	1	705.000.000		
5.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	12.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		
5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**0**		**30.000.000**		**50.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		
Terpenuhinya layanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		30.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**446.300.000**		**715.000.000**		**717.000.000**		**788.000.000**		**839.000.000**		
Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian PD yang sesuai standar regulasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	0	446.300.000	60	715.000.000	60	717.000.000	60	788.000.000	60	839.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		35		35		40		40			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	70		70		70		70		70			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	30		40		40		45		45			
5.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				42.000.000		30.000.000		30.000.000		0		50.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	70	42.000.000	70	30.000.000	70	30.000.000	70	0	70	50.000.000		
5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				201.600.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	201.600.000	35	350.000.000	35	350.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000		
5.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	0	0	60	35.000.000	60	37.000.000	60	38.000.000	60	39.000.000		
5.01.01.1.05.0011 - BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				202.700.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	30	202.700.000	40	300.000.000	40	300.000.000	45	350.000.000	45	350.000.000		
5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.443.814.243**		**1.799.831.569**		**1.967.742.908**		**2.219.830.000**		**2.039.830.000**		
Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	1.443.814.243	2	1.799.831.569	2	1.967.742.908	2	2.219.830.000	2	2.039.830.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		4		4		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6		6		6		6		6			
5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.264.000		12.400.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	3.264.000	1	12.400.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		
5.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				234.800.000		235.000.000		237.000.000		240.000.000		250.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	234.800.000	5	235.000.000	5	237.000.000	5	240.000.000	5	250.000.000		
5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.705.510		55.000.000		65.000.000		67.000.000		75.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	6	45.705.510	6	55.000.000	6	65.000.000	6	67.000.000	6	75.000.000		
5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				284.402.300		273.321.569		281.000.000		283.000.000		294.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6	284.402.300	6	273.321.569	6	281.000.000	6	283.000.000	6	294.000.000		
5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				315.610.000		365.610.000		413.742.908		422.000.000		423.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	315.610.000	2	365.610.000	2	413.742.908	2	422.000.000	2	423.000.000		
5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.330.000		8.500.000		8.500.000		5.330.000		5.330.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.330.000	4	8.500.000	4	8.500.000	2	5.330.000	2	5.330.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				504.808.433		750.000.000		850.000.000		890.000.000		880.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	504.808.433	1	750.000.000	1	850.000.000	1	890.000.000	1	880.000.000		
5.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				51.894.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	1	51.894.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000		
5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**50.000.000**		**480.000.000**		**1.460.000.000**		**1.280.000.000**		**150.000.000**		
Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah perangkat daerah yang sesuai dengan standar regulasi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000.000	0	480.000.000	1	1.460.000.000	1	1.280.000.000	0	150.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		6		1		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		2		2		2		1			
5.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		580.000.000		750.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	580.000.000	1	750.000.000	0	0		
5.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		350.000.000		650.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	6	350.000.000	1	650.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	80.000.000	1	50.000.000		
5.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		100.000.000		200.000.000		450.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	450.000.000	1	100.000.000		
5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.199.134.528**		**1.172.140.384**		**1.193.700.000**		**1.209.100.000**		**1.224.700.000**		
Terpenuhinya layanan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.199.134.528	1	1.172.140.384	1	1.193.700.000	1	1.209.100.000	1	1.224.700.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.400.000		12.700.000		13.700.000		14.100.000		14.700.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.400.000	1	12.700.000	1	13.700.000	1	14.100.000	1	14.700.000		
5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.853.200		120.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	102.853.200	1	120.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000		
5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.083.881.328		1.039.440.384		1.050.000.000		1.060.000.000		1.070.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.083.881.328	1	1.039.440.384	1	1.050.000.000	1	1.060.000.000	1	1.070.000.000		
5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**581.406.960**		**671.924.000**		**846.924.000**		**851.924.000**		**851.924.000**		
Terlaksananya pemeliharaan BMD PD yang sesuai regulasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3	581.406.960	3	671.924.000	3	846.924.000	3	851.924.000	3	851.924.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	40		25		25		25		25			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		2		2		2			
5.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.801.600		41.335.000		41.335.000		41.335.000		41.335.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	45.801.600	1	41.335.000	1	41.335.000	1	41.335.000	1	41.335.000		
5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				458.605.000		530.589.000		530.589.000		530.589.000		530.589.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31	458.605.000	31	530.589.000	31	530.589.000	31	530.589.000	31	530.589.000		
5.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3	5.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000		
5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.000.360		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	40	72.000.360	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
5.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				**3.189.200.712**		**3.779.260.283**		**4.074.605.708**		**4.047.896.000**		**5.136.696.000**		
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian program pembangunan daerah (%)	85,83	88	1.054.570.572	89	1.249.685.121	90	1.361.215.708	91	1.159.506.000	93	1.418.306.000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				**1.054.570.572**		**1.249.685.121**		**1.361.215.708**		**1.159.506.000**		**1.418.306.000**		
Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	3	3	807.920.572	3	1.055.175.121	3	1.166.705.708	3	964.994.500	3	1.223.796.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan Daerah (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				141.000.000		190.401.500		190.400.000		190.400.000		249.201.500		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	141.000.000	4	190.401.500	4	190.400.000	4	190.400.000	4	249.201.500		
5.01.02.1.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				220.920.072		289.700.000		289.700.000		289.700.000		289.700.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	3	3	220.920.072	3	289.700.000	3	289.700.000	3	289.700.000	3	289.700.000		
5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				446.000.500		575.073.621		686.605.708		484.894.500		684.894.500		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	446.000.500	4	575.073.621	4	686.605.708	4	484.894.500	4	684.894.500		
Terwujudnya keselarasan kinerja Kabupaten/ Kota dalam mendukung sasaran pembangunan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	15	10	246.650.000	10	194.510.000	10	194.510.000	10	194.511.500	15	194.510.000		
5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				246.650.000		194.510.000		194.510.000		194.511.500		194.510.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	15	10	246.650.000	10	194.510.000	10	194.510.000	10	194.511.500	15	194.510.000		
Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD (%)**	**100**	**100**	**2.134.630.140**	**100**	**2.529.575.162**	**100**	**2.713.390.000**	**100**	**2.888.390.000**	**100**	**3.718.390.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				**1.436.240.140**		**1.780.000.000**		**1.785.000.000**		**1.960.000.000**		**2.790.000.000**		
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	1.436.240.140	1	1.780.000.000	1	1.785.000.000	1	1.960.000.000	2	2.790.000.000		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2		3		2		3		3			
5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				167.728.720		130.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	167.728.720	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000		
5.01.02.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				191.928.720		130.000.000		150.000.000		150.000.000		280.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	191.928.720	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	280.000.000		
5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi				176.560.900		140.000.000		185.000.000		160.000.000		310.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1	176.560.900	1	140.000.000	1	185.000.000	1	160.000.000	2	310.000.000		
5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				900.021.800		1.380.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000		1.900.000.000		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	900.021.800	3	1.380.000.000	2	1.300.000.000	3	1.500.000.000	3	1.900.000.000		
5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				**698.390.000**		**749.575.162**		**928.390.000**		**928.390.000**		**928.390.000**		
Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40	94	698.390.000	94	749.575.162	94	928.390.000	94	928.390.000	94	928.390.000		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	3	3		3		3		3		3			
5.01.02.1.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				366.820.000		416.820.000		516.820.000		516.820.000		516.820.000		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40	94	366.820.000	94	416.820.000	94	516.820.000	94	516.820.000	94	516.820.000		
5.01.02.1.02.0004 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				331.570.000		332.755.162		411.570.000		411.570.000		411.570.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	3	3	331.570.000	3	332.755.162	3	411.570.000	3	411.570.000	3	411.570.000		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**4.284.090.471**		**4.238.700.548**		**4.919.056.548**		**5.571.347.989**		**5.966.892.604**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase keselarasan perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah (%)**	**100**	**100**	**4.284.090.471**	**100**	**4.238.700.548**	**100**	**4.919.056.548**	**100**	**5.571.347.989**	**100**	**5.966.892.604**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				**1.372.011.280**		**1.853.160.603**		**2.191.619.041**		**2.540.828.017**		**2.845.661.223**		
Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	2	1.372.011.280	2	1.853.160.603	2	2.191.619.041	2	2.540.828.017	2	2.845.661.223		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	2		2		2		2		2			
5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				54.250.000		59.675.000		65.642.500		72.206.750		79.427.425		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	54.250.000	2	59.675.000	2	65.642.500	2	72.206.750	3	79.427.425		
5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				53.250.000		76.680.000		92.016.000		110.419.200		132.503.040		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	53.250.000	2	76.680.000	2	92.016.000	2	110.419.200	3	132.503.040		
5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				87.800.000		199.872.000		239.846.400		257.815.680		285.378.816		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4	87.800.000	4	199.872.000	4	239.846.400	4	257.815.680	4	285.378.816		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				176.800.000		247.420.800		296.904.960		356.285.952		385.431.420		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	2	176.800.000	2	247.420.800	2	296.904.960	2	356.285.952	2	385.431.420		
5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				64.250.000		92.520.000		111.024.000		133.228.800		159.874.560		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	64.250.000	2	92.520.000	2	111.024.000	2	133.228.800	3	159.874.560		
5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				68.400.000		98.496.000		118.195.200		141.834.240		170.201.088		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2	68.400.000	2	98.496.000	2	118.195.200	2	141.834.240	3	170.201.088		
5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				111.130.000		85.442.160		282.442.160		339.036.710		356.844.052		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4	111.130.000	4	85.442.160	4	282.442.160	4	339.036.710	4	356.844.052		
5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				756.131.280		993.054.643		985.547.821		1.130.000.685		1.276.000.822		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	2	756.131.280	2	993.054.643	2	985.547.821	2	1.130.000.685	2	1.276.000.822		
5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				**1.984.587.624**		**1.121.378.571**		**1.357.599.360**		**1.582.235.103**		**1.619.010.781**		
Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	1.984.587.624	2	1.121.378.571	2	1.357.599.360	2	1.582.235.103	3	1.619.010.781		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	5		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.928.625		124.143.769		180.179.711		85.628.310		30.308.948		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	19.928.625	2	124.143.769	2	180.179.711	2	85.628.310	3	30.308.948		
5.01.03.1.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				99.996.294		24.625.279		28.333.832		152.081.861		152.081.861		
Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	99.996.294	2	24.625.279	2	28.333.832	2	152.081.861	3	152.081.861		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				69.999.390		81.127.095		108.408.868		104.649.089		106.460.324		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	69.999.390	4	81.127.095	4	108.408.868	4	104.649.089	4	106.460.324		
5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1.114.639.065		280.725.000		322.833.750		304.770.125		318.623.313		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	5	1.114.639.065	2	280.725.000	2	322.833.750	2	304.770.125	3	318.623.313		
5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				90.059.450		202.619.197		233.012.077		113.744.660		136.969.166		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	90.059.450	2	202.619.197	2	233.012.077	2	113.744.660	3	136.969.166		
5.01.03.1.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				100.138.650		24.847.820		29.992.383		152.298.369		152.298.369		
Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2	100.138.650	2	24.847.820	2	29.992.383	2	152.298.369	3	152.298.369		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				90.080.750		102.195.095		117.524.359		137.001.562		137.001.560		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	90.080.750	4	102.195.095	4	117.524.359	4	137.001.562	4	137.001.560		
5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				399.745.400		281.095.316		337.314.380		532.061.127		585.267.240		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	2	2	399.745.400	2	281.095.316	2	337.314.380	2	532.061.127	2	585.267.240		
5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				**927.491.567**		**1.264.161.374**		**1.369.838.147**		**1.448.284.869**		**1.502.220.600**		
Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	927.491.567	2	1.264.161.374	2	1.369.838.147	2	1.448.284.869	3	1.502.220.600		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2		2		2		2		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.500.000		21.425.000		23.825.000		31.450.000		32.670.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	19.500.000	2	21.425.000	2	23.825.000	2	31.450.000	3	32.670.000		
5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				35.250.000		36.550.000		37.640.000		38.430.000		61.230.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	35.250.000	2	36.550.000	2	37.640.000	2	38.430.000	3	61.230.000		
5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				114.250.000		169.250.000		174.250.000		177.250.000		177.250.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	114.250.000	4	169.250.000	4	174.250.000	4	177.250.000	4	177.250.000		
5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				493.321.567		705.791.374		745.678.147		749.354.869		761.670.600		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	493.321.567	2	705.791.374	2	745.678.147	2	749.354.869	2	761.670.600		
5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12.420.000		12.420.000		12.420.000		17.100.000		17.100.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	12.420.000	2	12.420.000	2	12.420.000	2	17.100.000	3	17.100.000		
5.01.03.1.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				12.350.000		12.825.000		13.125.000		13.300.000		20.900.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2	12.350.000	2	12.825.000	2	13.125.000	2	13.300.000	3	20.900.000		
5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				11.900.000		16.900.000		16.900.000		21.900.000		21.900.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	11.900.000	4	16.900.000	4	16.900.000	4	21.900.000	4	21.900.000		
5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				228.500.000		289.000.000		346.000.000		399.500.000		409.500.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2	228.500.000	2	289.000.000	2	346.000.000	2	399.500.000	2	409.500.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**1.299.986.875**		**1.474.801.447**		**1.657.398.583**		**1.720.000.000**		**1.830.000.000**		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**662.366.875**		**645.225.633**		**775.391.150**		**800.000.000**		**900.000.000**		
Meningkatnya Kualitas Riset di Daerah	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)**	**45**	**60**	**662.366.875**	**75**	**645.225.633**	**80**	**775.391.150**	**85**	**800.000.000**	**88**	**900.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				**83.160.000**		**100.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	6	3	83.160.000	3	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
5.05.02.1.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				83.160.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	6	3	83.160.000	3	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				**0**		**200.000.000**		**200.000.000**		**0**		**0**		
Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan di bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)			0	1	200.000.000		200.000.000		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)				1									
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0					1							
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)						1							
5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	0		0		0	1	100.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pendidikan dan Kebudayaan	dan Kebudayaan (Dokumen)													
5.05.02.1.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)			0		0	1	100.000.000		0		0		
5.05.02.1.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0		100.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)			0	1	100.000.000		0		0		0		
5.05.02.1.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				0		100.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)			0	1	100.000.000		0		0		0		
5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				**284.060.000**		**0**		**0**		**200.000.000**		**300.000.000**		
Tersedianya kajian berbasis bukti untuk mendukung pembangunan dibidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1	284.060.000		0		0		200.000.000		300.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)										1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)								1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)										1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)								1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)										1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		1											
5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				144.380.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		1	144.380.000		0		0		0		0		
5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				139.680.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1	139.680.000		0		0		0		0		
5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)			0		0		0	1	100.000.000		0		
5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)			0		0		0	1	100.000.000		0		
5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan				0		0		0		0		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Lingkungan Hidup														
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)			0		0		0		0	1	100.000.000		
5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)			0		0		0		0	1	100.000.000		
5.05.02.1.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)			0		0		0		0	1	100.000.000		
5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				**295.146.875**		**345.225.633**		**425.391.150**		**450.000.000**		**450.000.000**		
Terlaksananya Diseminasi hasil riset daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	295.146.875	1	345.225.633	1	425.391.150	1	450.000.000	1	450.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.1.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				19.315.375		195.225.633		225.391.150		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	19.315.375	1	195.225.633	1	225.391.150	1	250.000.000	1	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.1.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				275.831.500		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	275.831.500	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				**637.620.000**		**829.575.814**		**882.007.433**		**920.000.000**		**930.000.000**		
Meningkatnya Pertumbuhan Inovasi daerah	**Persentase inovasi daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award (%)**	**48**	**60**	**637.620.000**	**70**	**829.575.814**	**80**	**882.007.433**	**90**	**920.000.000**	**95**	**930.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	
5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi				**637.620.000**		**829.575.814**		**882.007.433**		**920.000.000**		**930.000.000**		
Menumbuhkan iklim inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	607.120.000	1	669.575.814	1	722.007.433	1	760.000.000	1	770.000.000		
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				488.060.000		469.575.814		512.007.433		540.000.000		540.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	488.060.000	1	469.575.814	1	512.007.433	1	540.000.000	1	540.000.000		
5.05.03.1.02.0009 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				119.060.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	1	1	119.060.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Inovasi di daerah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	1	1	30.500.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.1.02.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				30.500.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	1	1	30.500.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		

Kemudian melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2025-2029 yang dirumuskan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, selain difokuskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran PD, difokuskan juga untuk mendukung pelaksanaan Program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yang berkontribusi pada Program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut,

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
			5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
			5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.1.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
			5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.1.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.1.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.1.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Pertumbuhan Inovasi Daerah	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
			5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			5.05.03.1.02.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			5.05.03.1.02.0009 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Kinerja Penyelenggaraaan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu urusan wajib, pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan menjadi cerminan langsung dari efektivitas dan responsivitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan kepada publik. Oleh karena itu, mengukur dan menganalisis kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah tercapai secara optimal dan akuntabel. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang ditetapkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional. Adapun IKU Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	87,00	87,50	87,80	88,00	88,50	88,90	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,45	60,01	61,00	62,40	65,01	66,30	
3	Tingkat capaian sasaran RPJMD	Persen	90,00	92,50	94,00	96,50	98,00	98,50	
4	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	23,55	23,85	24,14	24,47	24,59	24,70	
6	Tingkat capaian sasaran RKPD	Persen	90,00	92,50	94,00	96,50	98,00	98,50	
7	persentase jumlah produk inovasi yang di manfaatkan	Persen	78	80	83	86	90	91	
8	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	38	50	63	75	87	100	
9	Nilai SAKIP PD	Nilai	86,5	87,0	88,0	88,5	89,0	90	

Sumber : data diolah,2025

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut,

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	38	50	63	75	87	100	
3.	Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award	%	50	60	70	80	90	95	

Sumber : data diolah, 2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menyajikan informasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2025-2029. Kemudian Dokumen Renstra tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 melalui sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan.

Dalam proses penyusunan Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 berpedoman peraturan perundang-undanganan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dan operasional dalam urusan bidang Perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi daerah), serta dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen ini untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2. Memastikan kesiapan kelembagaan, tatalaksana, sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Melaksanakan sosialisasi dokumen Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara kepada seluruh pegawai, mitra, serta pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Dokumen Renstra Bapperida akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, perjanjian kinerja dan manajemen resiko Perangkat Daerah;

5. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin dan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan efektifitas, efisiensi dan dampak kinerja tersebut.

Pengendalian dan evaluasi Renstra tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi Renstra tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat daerah..

Kemudian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dan terjadi perubahan regulasi, kebijakan nasional, nomenklatur, struktur organisasi atau dinamika strategis lainnya maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Tanjung Selor, September 2025
Kepala Badan,

Bertius, S.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19720206 199301 1 001